

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sumber daya pesisir terdiri dari sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain sedangkan sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut serta sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan lahan tempat tinggal juga semakin besar, sedangkan wilayah pesisir merupakan wilayah yang mempunyai daya dukung yang sangat tinggi dan kaya akan sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang, minyak dan gas bumi sehingga menyebabkan wilayah pesisir menjadi tempat terkonsentrasinya berbagai kegiatan manusia dan pembangunan (Nurul *et al*, 2005).

Kabupaten Situbondo mencakup 17 kecamatan, 132 desa dan 4 kelurahan. Kondisi geografis yang didominasi oleh kecamatan yang berada di pesisir, inilah yang menyebabkan Kabupaten Situbondo mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan luas wilayah laut yang dikelola lebih kurang adalah 1.036,36 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo adalah 1.415,17 Km<sup>2</sup>. Dengan demikian luas keseluruhan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Situbondo adalah 2.451,53 Km<sup>2</sup>. Peningkatan jumlah penduduk dan intensitas pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Situbondo akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan ruang yang menimbulkan ketidakharmonisan, ketidaknyamanan, dan konflik pemanfaatan ruang antar berbagai kepentingan. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih pembangunan dan pola pemanfaatan ruang yang nantinya dikhawatirkan tidak sesuai dengan daya dukung sumberdaya pesisir dan kesesuaian lahan. Wilayah pesisir Kabupaten Situbondo memiliki kekayaan alam yang melimpah sekaligus menyimpan berbagai permasalahan yang perlu ditangani. Salah satu permasalahan yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Situbondo pada saat ini yaitu adanya alih fungsi lahan di

sekitar kawasan pesisir dimana lahan yang dulunya kosong dan berfungsi sebagai resapan air telah berubah menjadi lahan terbangun seluas 208,5 Ha serta permukiman di desa pesisir semakin bertambah banyak setiap tahunnya.

Sumber daya wilayah pesisir di daerah ini pada umumnya belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan bahkan belum dilakukan inventarisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Bahkan pemanfaatan lahan wilayah pesisir cenderung lebih berorientasi ke asas ekonominya dan kurang mempertimbangkan asas kelestarian dan daya dukung lahan. Untuk mencapai penataan secara terintegrasi antar segenap pengguna (*stakeholder*), maka diperlukan suatu model dinamis penataan kawasan pesisir serta membuat skenario kebijakan sehingga didapatkan pilihan kebijakan yang mendukung dan sesuai dengan kondisi kawasan tersebut.

Penataan ruang kawasan pesisir Kabupaten Situbondo merupakan permasalahan yang kompleks baik dilihat dari aspek fisik maupun sosial kependudukan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan yang memperhatikan kawasan pesisir Kabupaten Situbondo dalam satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari beberapa elemen pembentuk wilayah yang saling berinteraksi dan berkaitan antara satu elemen dengan elemen lainnya dan tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya. Pendekatan sistem dinamis dalam penyusunan model penataan ruang kawasan pesisir Kabupaten Situbondo diharapkan dapat menampilkan perilaku sistem penataan ruang pada kondisi aktual, sehingga dapat dilakukan serangkaian skenario model penataan ruang. Struktur model tersebut disimulasikan beberapa skenario kebijakan sehingga didapatkan pilihan kebijakan yang mendukung bagi kelangsungan penataan kawasan pesisir secara terpadu. Model kebijakan tersebut diharapkan berguna sebagai alat untuk pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, sehingga para pengambil keputusan memiliki landasan yang kuat dalam menetapkan kebijakan penataan di wilayah pesisir.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Wilayah Kabupaten Situbondo mencakup 17 kecamatan, 132 desa dan 4 kelurahan. Kondisi geografis yang didominasi oleh kecamatan yang berada di pesisir. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, 13 diantaranya memiliki garis pantai, sedang 4 kecamatan tidak memiliki garis pantai yaitu Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng, Situbondo dan Panji.

1. Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai yang terdapat di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Situbondo masih belum dikelola dengan baik, misalnya: adanya permukiman seluas 208,5 Ha yang berada di kawasan

sempadan pantai, serta penebangan hutan bakau (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo, 2008-2027).

2. Kegiatan eksploitasi sumber daya yang tersedia di kawasan pesisir dan perairan Situbondo yang tidak ramah lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti berkurangnya hutan bakau akibat penebangan sehingga menyebabkan abrasi gelombang laut yang cukup besar, penangkapan ikan dengan peledak yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, penebangan dan pembukaan areal tambak pada hutan *mangrove* dan sejenisnya, begitu juga dengan *mangrove* sekitar 40% kondisinya telah rusak. (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo, 2008-2027).
3. Kurangnya pengelolaan kawasan dan pemeliharaan sarana-prasarana yang ada misalnya kondisi pantai dan lingkungan sekitarnya yang terlihat masih kotor dan kurang terurus, sarana-prasarana obyek wisata yang kurang berkembang, sarana-prasarana perikanan yang kurang memadai (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo, 2008-2027).

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pengelolaan pesisir di Kabupaten Situbondo, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana penentuan wilayah prioritas penanganan kawasan pesisir di Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana kajian daya dukung kawasan pesisir di wilayah studi?
3. Bagaimana model dinamis penataan kawasan pesisir di wilayah studi?

### 1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai pada peneliti ini antara lain:

1. Menentukan dan mengidentifikasi wilayah prioritas penanganan kawasan pesisir di Kabupaten Situbondo
2. Mengkaji daya dukung kawasan pesisir di wilayah studi
3. Menyusun model dinamis penataan kawasan pesisir di wilayah studi

### 1.5 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini batasan penelitian tercakup pada 2 ruang lingkup, yaitu Ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

### 1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Secara geografis Kabupaten Situbondo terletak pada  $7^{\circ}35'$  -  $7^{\circ}44'$  LS dan  $113^{\circ}30'$  -  $114^{\circ}42'$  BT. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km<sup>2</sup> atau 163.850 Ha, berbentuk memanjang dari barat ke timur kluang lebih 168 Km. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, 13 diantaranya memiliki garis pantai, sedang 4 kecamatan tidak memiliki garis pantai yaitu Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng, Situbondo dan Panji. Batas-batas administrasi Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi

Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Timur : Selat Bali

### 1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberi batasan terhadap pembahasan masalah penelitian sehingga penelitian tersebut dapat terarah dan mencapai sasaran. Adapun pembahasan materi yang akan dibahas dalam “Pemodelan Dinamis Penataan Kawasan Pesisir di Kabupaten Situbondo” adalah sebagai berikut:

#### 1. Penentuan wilayah penanganan penatagunaan kawasan pesisir

Penentuan wilayah penanganan penatagunaan kawasan pesisir dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi pesisir Kabupaten Situbondo kemudian dipilih salah satu Kecamatan yang mengalami perkembangan pesat/daerah yang cepat berkembang.

#### 2. Mengkaji daya dukung kawasan pesisir di wilayah studi

Kajian daya dukung kawasan pesisir di wilayah studi dilakukan untuk mengetahui kemampuan kawasan pesisir dalam menyediakan ruang (*space*) untuk masing-masing guna lahan.

a. Pembahasan guna lahan di wilayah pesisir ini hanya di batasi kearah daratan saja, sedangkan untuk pemanfaatan lahan kearah laut hanya sebagai gambaran umum di wilayah studi saja.

b. Kajian daya dukung kawasan pesisir Kabupaten Situbondo menggunakan Pedoman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang model analisis daya dukung wilayah pesisir dan laut.

#### 3. Menyusun model dinamis penataan kawasan pesisir di wilayah studi

- a. Kajian dalam penyusunan model dinamis penataan kawasan pesisir Kabupaten Situbondo dibatasi pada aspek fisik, serta aspek sosial kependudukan yang mencakup jumlah penduduk.
- b. Model dinamis penataan kawasan pesisir yang akan disusun merupakan kombinasi antara subsistem kependudukan dengan lahan.
- c. Model dinamis penataan kawasan pesisir Kabupaten Situbondo, nantinya akan dibuat tiga skenario model.
- d. Periode analisis simulasi model dibatasi dari tahun 2013 sampai tahun 2033.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

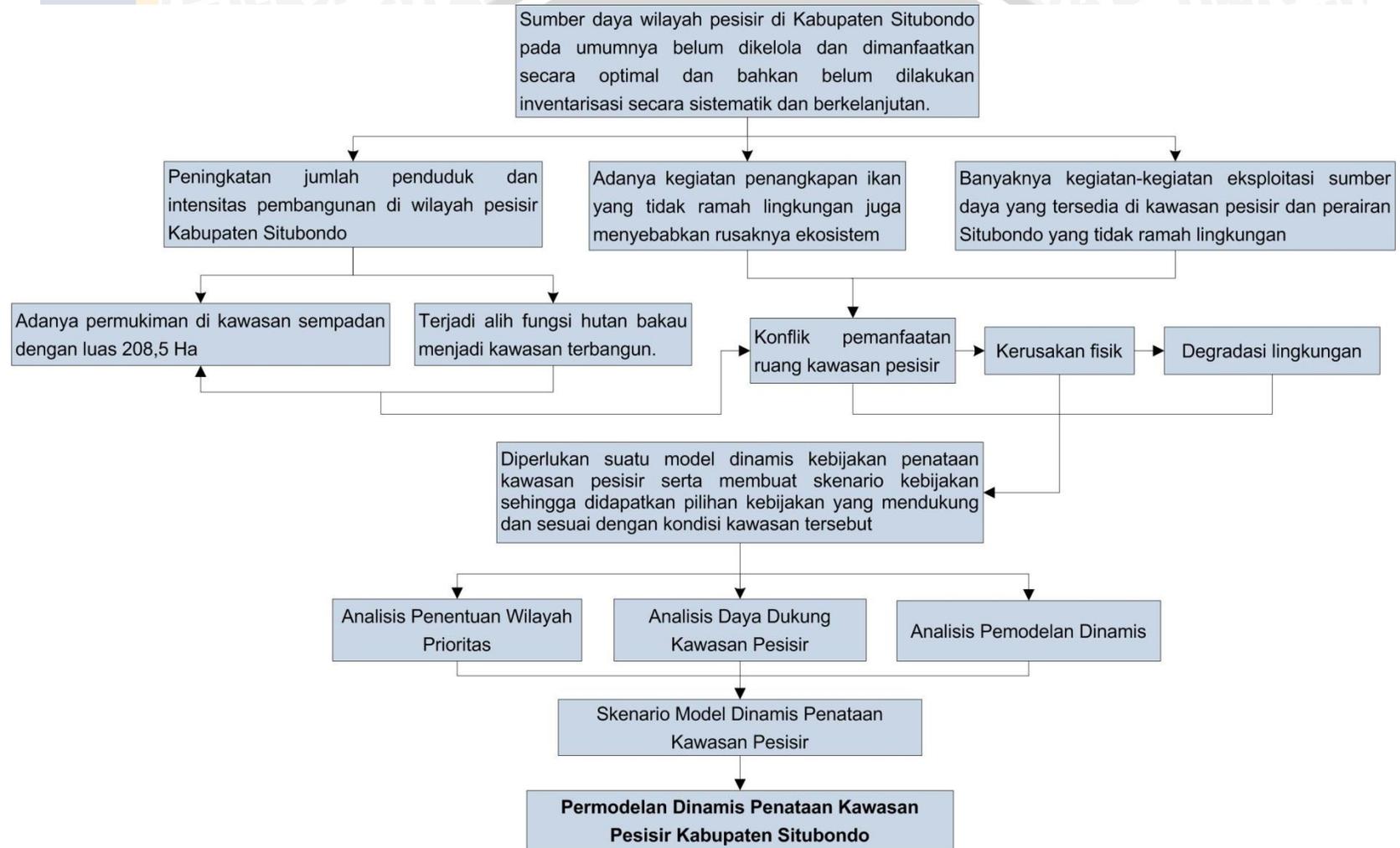
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yaitu:

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai model dinamis penataan kawasan pesisir sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti apabila terjun dimasyarakat.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan bidang keilmuan terutama dalam bidang penataan kawasan pesisir.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penataan kawasan pesisir dengan memperhatikan kebutuhan berbagai pihak yang terkait.

### **1.7 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini merupakan suatu bentuk ringkasan dari tahapan-tahapan pemikiran yang dilatarbelakangi oleh permasalahan yang diambil hingga menemukan bentuk penyelesaian permasalahannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.





Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

## **1.8 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan dalam penelitian ini berisi latar belakang, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup wilayah dan materi, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi kumpulan teori-teori yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses analisis pada penelitian ini, terutama teori-teori yang terkait dengan penataan kawasan pesisir serta analisis sistem dinamis. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi literatur dan beberapa penelitian terdahulu yang meliputi jurnal dan tugas akhir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi mengenai cara-cara yang digunakan dalam penelitian, meliputi diagram alir penelitian, kerangka analisis, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan desain survei.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisi mengenai kondisi atau gambaran umum wilayah studi. Selain itu, bab ini berisi hasil penentuan wilayah prioritas penanganan, kajian daya dukung serta pemodelan panataan ruang wilayah pesisir. Pada bab ini juga dibahas konsep dan arahan zonasi kawasan pesisir terkait daya dukung permukiman, pelabuhan, serta perikanan tangkap.

### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini berisikan tentang hasil dan kesimpulan dari hasil studi yang telah dilakukan dan disertai juga saran-saran penggunaan hasil studi serta perlu tidaknya studi lanjutan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemodelan penataan kawasan pesisir.

